



Danais, Bisakah untuk Penanganan Masalah Sampah di Jogjakarta?

## Alokasikan Rp 16 M melalui Skema BKK di Kalurahan

Jogjakarta belum merdeka dari sampah. Sampah masih bertebaran di berbagai sudut jalan. Ini menyusul ditutupnya TPST Piyungan, Bantul, beberapa waktu lalu. Meski sudah dibuka kembali, pengoperasian TPST Piyungan hanya untuk sampah dari Kota Jogja, itu pun terbatas. Masyarakat banyak yang bertanya, bisakah dana keistimewaan (danais) untuk menangani sampah di DIJ?

PEMROV DIJ mengalokasikan danais sekitar Rp 16 miliar untuk penanganan sampah. Alokasi ini disalurkan melalui kalurahan di wilayah kabupaten di DIJ

► Baca *Alokasikan...* Hal C

**INSIGHT**



**ANTRE DIANGKUT:**  
Warga membuang sampah di depo sampah depan Stadion Mandala Krida, Kota Jogja (9/8). Sejumlah depo sampah di Kota Jogja telah dibuka namun dengan pembatasan jadwal pembuangan karena daya tampung TPST Piyungan, Bantul hanya 100 ton per hari.



SUNYU AGA TRITANARACHA JOGJA

# Alokasikan Rp 16 M melalui Skema BKK di Kalurahan

Sambungan dari hal 1

Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIJ Aris Eko Nugroho mengatakan, alokasi danais untuk penanganan sampah tidak dilakukan di TPST Piyungan. Danais disalurkan ke wilayah kabupaten melalui kalurahan untuk pengolahan sampah.

"Ada (danais untuk penanganan sampah, *Red*), tapi tidak di TPST Piyungan. Ada di Kabupaten Bantul, Sleman, Gunungkidul dan Kulon Progo juga ada di tahun 2023 ini. Baru awalan sebenarnya," katanya kemarin (30/8).

Aris menjelaskan, alokasi danais untuk penanganan sampah memang baru di 2023 ini. Bentuknya, di Kabupaten Sleman melalui skema bantuan keuangan khusus (BKK) untuk pengolahan di Tamanmartani Sleman. Sedangkan tiga kabupaten lain yaitu Bantul, Gunungkidul dan Kulon Progo melalui skema BKK

pada kalurahan.

"Kalau di Bantul ada tiga kalurahan, tapi yang melaksanakan empat kalurahan. Jadi ada satu kalurahan desa mandiri budaya yang sudah melaksanakan yaitu di Desa Bangunjiwo," ujarnya.

Adapun Kalurahan di Bantul yang menerima langsung BKK adalah Karangtengah, Guwosari, dan Panggungharjo. Untuk Kulon Progo kalurahan yang menerima BKK berada di Banjararum. Dan Sementara Kabupaten Gunungkidul ada di Kalurahan Kepek.

"Ini sifatnya TPS3R, tetapi itu yang dikelola langsung oleh BUMDesnya desa sebagian besar," jelasnya.

Aris menyebut, total alokasi dana keistimewaan untuk penanganan sampah melalui tingkat kalurahan antara Rp 15 miliar hingga Rp 16 miliar di tahun 2023.

Dicontohkan kegiatan dengan alokasi danais ini, seperti di Kalurahan Pang-

gungharjo yang mengolah sampah menggunakan metode lodong sisa dapur (lodsida). Juga Kalurahan Guwosari melalui BUMDes mampu mengelola sampah secara mandiri dengan konsep *zero waste* atau pengelolaan dengan melakukan pemilahan, pengomposan, dan pengumpulan barang layak jual. Sekitar satu ton sampah per hari bisa diolah menjadi berkah. "Jadi masing-masing beda. Kalau yang di posisi Tamanmartani beda lagi," terangnya.

Menurutnya, karena Tamanmartani ini membuat TPST tersebar di tiga tempat. Sehingga ada dukungan berkaitan alat pengolah sampah di Tamanmartani senilai hampir Rp 7 miliar.

"Kalau alatnya untuk pemilahan dan yang lain-lain. Antara kabupaten dan provinsi memberi alat, nah alatnya bagian apa yang tahu kabupaten," tambah Aris. **(wia/laz/fj/by)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005